KEMENTERIAN KEUANGAN RI							
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							

IACWI6U3

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 H.2					H.4 X Final H.5 Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG										
A.1 N	A.1 NPWP : 7 3 9 5 1 8 5 3 8 7 2 2 0 0 0									
A.2 N	A.2 NIK : The state of the stat									
A.3 Nama : MARIA ULFA										
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG										
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PA		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)		
B.1 B.2		B.3		B.4	B.5	B.6	B.7			
	4 21-402-01			8.990.000	8.990.000	0	5	449.500		
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota										
B.8	.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 02645/LS-TJ/RSJD.AHM/2022									
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal						1 dd 0 4	4 mm	2 0 2 2 <i>уууу</i>		
B.9	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.									
	Nomor: Tanggal									
B.10	B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :										
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK										
C.1										
			RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3	C.3 ID Subunit Organisasi :									
C.4	Tanggal : 0 Z		0 4	dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy			_		
C.5	<u>——</u>			Υ						
			ini saya menyatakan bangani secara elektronik.	ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah s	saya isi dengan	ı benar dan telah saya			
				Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.						